

STUDI KASUS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI BALI DALAM PENDEKATAN KONSEPSUAL

I Putu Astawa

(Staf Pengajar Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata, Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aktivitas salah satu kewirausahaan sosial di Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan lembaga dalam meningkatkan kinerja dan meningkatkan perekonomian desa. Kajian ini bersifat naratif yang bersumber dari kajian-kajian sebelumnya di tambah data sekunder untuk mengembangkan sebuah bangunan konsep penelitian. Hasil kajian dapat menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial dalam bentuk LPD dengan memperhatikan faktor lingkungan terutama mengenai budaya lokal akan memperkuat keberadaan usaha yang dapat meningkatkan kinerja. Penerapan nilai-nilai harmoni THK dengan baik di LPD mendorong para nasabah untuk melakukan pembayaran kredit dengan baik karena di dalam praktik nilai harmoni ada unsur yang berkaitan dengan Tuhan yang diyakini memberikan fibrasi positif tentang keberhasilan yang dilakukan di dunia ini. Nilai-nilai Falsafah Tri Hita Karana membentuk sikap mental serta perilaku pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang telah memainkan peran dalam pertumbuhan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.

Katakunci : Kewirausahaan sosial, LPD, THK

Abstract: This study aims to explain the activity of one of social entrepreneurship in Bali which is the village credit institution (LPD) which are influenced by cultural factors and institutions in improve their performance and to improve economic conditions village . This study is narrative sourced from previous study in addition to the secondary data to develop a building the concept of research. The findings of the study can explain that social entrepreneurship in the form of LPD by taking into account environmental factor especially over the local culture will strengthen the presence of businesses to increase performance. The application of harmony THK values well in LPD encourage its customers to make payments in credit well because in practice the value of harmony pertaining to god who is believed to give vibration positive about the success of that were taken in this world . Values of philosophy tri hita karana form the mental attitude and behavior management the village credit institution (lpds) in bali that have played a role in the growth of the performance of the village credit institution (LPD) in Bali .

Keywords: social entrepreneurship, LPD, THK

PENDAHULUAN

Kewirausahaan sosial menjadi fenomena menarik yang dibahas , karena mempunyai dampak global dibidang sosial melalui ide yang inovatif membantu masyarakat miskin (Robinson, et.al (2009). Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kewirausahaan sosial adalah disparitas kekayaan global; gerakan tanggung jawab sosial; pasar, Kegagalan

kelembagaan dan negara; dan kemajuan teknologi dan tanggung jawab bersama (Zahra et al. (2008). Faktor ini memberikan dorongan setiap negara di dunia lebih sadar akan kepedulian masyarakat yang kurang mampu.

Model kepedulian di tiap negara kalau dilihat dari konsep kewirausahaan sosial dapat bersifat pribadi, umum, dan non profit (Johnson, 2000; Nicholls, 2008). Konsep ini mengalami perubahan sangat cepat dari konsep awalnya yang diperkenalkan pada Tahun 1970an. Istilah kewirausahaan sosial pertama kali disebutkan pada tahun 1972 oleh Joseph bank di dalam pekerjaan seminalis menamai *The Sociology of Social Movements*, di mana dia menggunakan istilah untuk menggambarkan perlunya menggunakan kemampuan manajerial dalam mengatasi masalah sosial serta untuk mengatasi tantangan bisnis.

Kewirausahaan Sosial secara teori mungkin menjadi faktor pembangunan sosial melalui ekonomi berkelanjutan dan layak model (El Ebrashi, 2010). Pengusaha sosial yang berfokus pada penciptaan dampak sosial dan perubahan sosial (Nicholls, 2006; Mair dan Noboa, 2006) dan transformasi sosial. Apa yang dijelaskan ini akan memperkenalkan dan menjelaskan sebuah tipologi perusahaan yang berfokus pada perubahan sosial dan transformasi yang berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana organisasi sosial berkembang, bagaimana kondisi di dunia mempengaruhi organisasi-organisasi ini, dan bagaimana organisasi-organisasi ini mempertahankan tatanan sosial.

Salah satu kewirausahaan sosial di Bali yang bertujuan mempertahankan tatanan ekonomi dan social yang terinspirasi dari Muhammad Yunus yang membangun Grameen Bank. Pada tahun 1980 Profesor Ida Bagus Mantra adalah Gubernur Bali mengikuti pertemuan yang diprakarsai oleh Grameen Bank di Bangladesh. Sepulang dari pertemuan tersebut pada tahun 1984 didirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebanyak dua belas, yang tersebar di duabelas desa di Provinsi Bali. Pada tahun 2010 di Bali terdapat 1405 LPD yang tersebar di delapan kabupaten dan satu kota madya. Keberadaan LPD di Bali diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2, Tahun 1988 dan telah diperbarui dengan Perda Nomor 8, Tahun 2002. Tujuan pokok dari LPD adalah memberikan pelayanan kredit dan pelestarian budaya Bali.

LPD yang didirikan telah memberikan manfaat bagi masyarakat terkait dengan ekonomi (Suartana, 2009) dan telah menjalankan nilai-nilai budaya lokal dalam kegaitan kesehariannya dengan baik (Astawa, et.al, 2012). Disisi lain peranan pemilik sangat mempengaruhi dalam mendorong kinerja LPD kearah lebih baik terutama dalam mengatasi permasalahan kredit (Astawa, et.al. 2013). Masalah kredit merupakan salah satu isu yang sangat penting diperhatikan dalam membangun kinerja keuangan. Tidak adanya masalah kredit akan memberikan ruang lebih baik dalam menggulirkan dana ke masyarakat. Isu lain dalam operasional LPD tidak terlepas dari faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan lembaga (Jiao, 2011) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Kajian ini akan mencoba menjelaskan pengaruh dua faktor lingkungan yaitu lingkungan sosial dan lingkungan lembaga terhadap kewirausahaan sosial oleh Jiao (2011) untuk mencapai kehidupan masyarakat lebih baik. Pada kajian ini akan menggunakan budaya lokal sebagai sub variabel faktor lingkungan sosial , lembaga desa adat sebagai sub variabel lingkungan kelembagaan, dan kinerja LPD dengan jumlah kredit yang disalurkan. Semua variabel dijelaskan secara naratif berdasarkan penelusuran dari kajian empirik sebelumnya dan ditambah data sekunder yang diperoleh untuk memperkuat pembahasan. Permasalahan dapat dibangun bagaimana peranan budaya lokal dan lembaga desa adat terhadap peningkatan pelayanan LPD guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di Bali.

TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan membangun sebuah konsep atas aktivitas salah satu kewirausahaan sosial di Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan lembaga dalam meningkatkan kinerja dan meningkatkan perekonomian desa.

KAJIAN TEORI

Kewirausahaan Sosial

Secara akademis, konsep social entrepreneurship telah dikembangkan di universitas-universitas (Nicholls, 2006). Salah satunya universitas yang ada di Inggris, seperti Skoll Center for Social Entrepreneurship. Di Amerika Serikat juga didirikan pusat-pusat kajian social entrepreneurship, contohnya Center for the Advancement of Social entrepreneurship di Duke University. Contoh praktik social entrepreneurship, terdapat pada yayasan yang sudah mengglobal, yang secara khusus mencari para social entrepreneur di berbagai belahan dunia untuk membina dan memberikan dananya bagi para penggerak perubahan sosial yakni Ashoka Foundation. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Barenson dan Gartner (2004 dalam Jurnal Galang (PIRAC, 2006, 12)), pada organisasi-organisasi seperti : Plan Puebla di Mexico, Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), The Self-Employed Woman Association (SEWA), Grammeen Bank di Bangladesh dan Six-S di Perancis. Berbagai organisasi tersebut diklasifikasikan sebagai organisasi social entrepreneurship. Kesamaan karakteristik organisasi-organisasi tersebut ialah semuanya berupaya memberikan alternatif jawaban untuk menuntaskan permasalahan sosial khususnya kemiskinan.

Menurut Yayasan Schwab sebuah yayasan yang bergerak untuk mendorong aktivitas social entrepreneurship menyatakan bahwa : para social entrepreneur menciptakan dan memimpin organisasi, untuk menghasilkan laba ataupun tidak, yang ditujukan sebagai katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, metodologi, dan perubahan sikap. Definisi tersebut memberikan penjelasan bagaimana para social entrepreneur memajukan perubahan sistemik pada lingkungan sosialnya dengan cara mengubah perilaku dan pemahaman atau kesadaran orang-orang di sekitarnya.

Eduardo Morato, Ketua Asian Institute Management (AIM) pada tahun 1980-an, yang memperkenalkan social entrepreneurship dengan definisinya sebagai berikut : Wirausaha sosial merupakan orang atau lembaga inovatif yang memajukan penciptaan dan penyelenggaraan usaha yang berhasil bagi mereka yang membutuhkan. Wirausaha sosial berbeda dengan usaha yang lazim atau usaha niaga dengan satu ciri utama, yakni menaruh kepedulian pada upaya membantu kesejahteraan pihak lain daripada kesejahteraan diri sendiri. Pihak yang dibantu oleh Wirausaha sosial ialah golongan yang kurang beruntung atau lebih miskin di kalangan masyarakat. Berdasar pandangan Jiao (2011) pengertian kewirausahaan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek

a. Definitions based on the mission

Beberapa cendekiawan menganggap misi menentukan kewirausahaan social bahwa pengusaha sosial memainkan peran agen perubahan di sektor sosial, dengan mengadopsi sebuah misi untuk membuat dan mempertahankan nilai sosial (tidak hanya nilai pribadi), mengenali dan tanpa henti mengejar peluang-peluang baru untuk melayani misi, terlibat dalam proses inovasi yang berkelanjutan, adaptasi dan belajar, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya saat ini di tangan, dan menunjukkan peningkatan akuntabilitas kepada konstituen yang disajikan dan untuk menciptakan hasil.

b. Definitions based on the multiple dimensions of social entrepreneurship

Mort et al. (2003, p. 76) percaya bahwa entrepreneurship sosial mengarah untuk pendirian usaha sosial baru dan terus berinovasi yang ada dalam satu konseptual kewirausahaan sosial. Contoh membangun sebuah multidimensional dengan melibatkan ekspresi perilaku kewirausahaan yang baik untuk mencapai misi sosial, sebuah tujuan persatuan koheren dan tindakan di wajah dari kompleksitas. Kemampuan moral untuk menganalisa peluang nilai sosial dan kunci pengambilan keputusan adalah karakteristik dari inovasi, proaktif dan pengambilan resiko.

c. Definitions based on the operational process or mechanism of social entrepreneurship

Beberapa literatur menganggap kewirausahaan sosial sebagai proses untuk mengubah dunia (Chell, 2007). Kewirausahaan sosial adalah konstruksi, evaluasi dan mengejar peluang untuk perubahan sosial transformatif dilakukan oleh individuals visioner, penuh semangat dan berdedikasi. Mair dan Mart (2006) melihat kewirausahaan sosial dalam cara yang lebih luas, sebagai suatu proses yang melibatkan penggunaan inovatif dan kombinasi sumber daya untuk mengejar peluang untuk mengkatalisasi perubahan sosial dan/atau alamat sosial yang diperlukan.

Budaya Lokal

Kewirausahaan sosial tidak terlepas dari lingkungan sosial dimana perusahaan itu didirikan. Lingkungan sosial menurunkan sebuah budaya yang akan dianut dan dijalankan secara sadar dalam masyarakat berinteraksi. Di Bali berkembang budaya yang mengedepankan keselarasan hubungan dengan Tuhan, Manusia, dan lingkungan alam. Konsep budaya ini dikenal dengan budaya tri hita karena. Budaya *THK* merupakan budaya yang bersumber dari kearifan lokal. Menurut Sobirin (2007) budaya nasional terbentuk oleh alasan-alasan yang berbeda karena munculnya sebuah negara memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai faktor (seperti etnis, ekonomi, politik, agama, ataupun bahasa) memberikan kontribusi dalam pembentukan budaya nasional. Schein (2004) mengemukakan bahwa budaya organisasi didasarkan atas tiga tingkatan yaitu: Pertama adalah *artifacts*, sesuatu yang dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dapat langsung dilihat dari struktur sebuah organisasi dan proses yang dilakukan dalam organisasi. *Artifacts* merupakan hal yang paling mudah ditangkap saat kita memasuki sebuah organisasi karena berhubungan dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan saat berada dalam sebuah lingkungan organisasi. Kedua, *espoused beliefs and values* adalah nilai-nilai pendukung mencakup strategi, tujuan, dan filosofi dasar yang dimiliki oleh organisasi yang dapat dipahami jika sudah mulai menyelami organisasi tersebut dengan tinggal lebih lama dalam organisasi. Nilai-nilai pendukung biasanya dinyatakan secara tertulis dan menjadi acuan bagi setiap langkah yang dilakukan oleh anggota organisasi. Ketiga, *underlying basic assumptions*, merupakan asumsi-asumsi tersirat yang diyakini bersama. Nilai-nilai, kepercayaan, dan asumsi-asumsi yang digunakan oleh para pendiri yang dianggap sebagai hal penting dalam membawa organisasi menuju gerbang kesuksesan.

Model yang dikembangkan Schein (2004) membantu mengorganisasi teka-teki budaya di mana artifak merupakan hal yang paling mudah diamati, sementara asumsi dasar perlu disimpulkan. Untuk memahami perilaku atau kepercayaan yang dimaksudkan oleh anggota, asumsi dasar harus diangkat. Asumsi dasar merupakan tingkatan yang paling sulit karena berada di luar kesadaran. Model Schein (2004) dapat diaplikasikan, baik terhadap budaya nasional maupun budaya organisasi. Kebudayaan selalu dikonsepsikan sebagai hasil dari hubungan yang dipolakan dari berbagai unsur, seperti teknologi, kepercayaan, nilai, dan aturan yang berfungsi sebagai pedoman. *THK* merupakan produk perilaku manusia yang lebih bersifat subjektif dan interpretatif. Oleh sebab itu, simbol-simbol akan terbangun oleh pemahaman subjektif yang dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang mempunyai konsekuensi objektif. Dalam kaitannya

dengan *THK*, *parahyangan* analog dengan subsistem nilai, *pawongan* analog dengan subsistem sosial, dan *palemahan* analog dengan subsistem artefak (Windia 2007)

Kelembagaan

Keberhasilan kewirausahaan sosial juga didukung pemerintah seperti pemerintah desa, kabupaten, dan propinsi. Untuk Kewirausahaan sosial berupa LPD didukung oleh lembaga desa adat atau lembaga yang ada didesa di Bali. Bentuk Desa di Bali terutama didasarkan atas kesatuan tempat. Disamping kesatuan wilayah maka sebuah desa merupakan pula suatu kesatuan keagamaan yang ditentukan oleh suatu kompleks pura desa yang disebut *Kahyangan Tiga*, ialah *Pura Puseh*, *Pura Bale Agung* dan *Pura Dalem*. Ada kalanya Pura Puseh dan Pura Bale Agung dijadikan satu dan disebut *Pura Desa* (Baliaga, 2000). Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, di Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, 'desa' dalam pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah 'Desa Dinas' atau 'Desa Administratif'. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu desa adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (*Kahyangan Tiga*). Dasar pembentukan desa adat dan desa dinas memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga wilayah dan jumlah penduduk pendukung sebuah desa dinas tidak selalu kongruen dengan desa adat. Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa kahyangan tiga atau kahyangan desa (Dharmayuda, 2001).

Lembaga Perkreditan Desa

Salah satu kewirausahaan sosial yang telah tumbuh dan berkembang di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan jenis Lembaga keuangan mikro non bank di mana pemiliknya adalah lembaga *desa adat* atau *desa pakraman* serta merupakan satu-satunya lembaga keuangan mikro non bank yang dikelola oleh adat di Indonesia. LPD telah melebihi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada, dimana jumlah asetnya hanya mencapai sebesar 3,142 triliun pada tahun yang sama (Kontan,2010). Peraturan Daerah No. 8 tahun 2002 juga menjelaskan bahwa LPD adalah milik *desa pakraman*, sedangkan *desa pakraman* itu sendiri merupakan kumpulan komunitas yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Perda Propinsi Bali, No. 3, 2003).

PEMBAHASAN

Pengaruh Budaya Lokal Terhadap LPD

Lembaga perkreditan desa dalam menjalankan aktivitasnya di pengaruhi oleh lingkungan sosial salah satunya adalah budaya masyarakat bali yaitu budaya harmoni yang mengedepankan

keselarasan hubungan dengan Tuhan, Manusia, dan lingkungan. Beberapa kajian sebelumnya menjelaskan praktik nilai-nilai harmoni yang dijalankan dengan baik oleh lembaga *desa adat* menjadi penguat kepercayaan *krama desa adat* tentang manfaat keberadaan LPD. Dengan demikian, tumbuh rasa memiliki dan menjaga agar LPD tetap eksis dan berkembang melalui tindakan-tindakan pemenuhan kewajiban. (Astawa et.al (2013).

Budaya tri hita karena ini merupakan budaya lokal yang telah diterapkan oleh industry perhotelan sebagai budaya organisasi,. Hal ini telah diakui oleh dunia dan terbukti setiap tahun diadakan perlombaan atas implementasi budaya yang menekankan keharmonisan dengan Tuhan, karyawan atau manusia, dan alam sekitarnya. Budaya ini telah diterapkan pada LPD terbukti dari hasil kajian yang dilakukan Astawa *et al.* (2012, 2013) bahwa budaya harmoni ini mampu mendorong kinerja LPD kearah lebih baik melalui penurunan tingkat kemacetan kredit. Gunawan (2010) menyatakan bahwa budaya tri hita karena berpengaruh terhadap pencapaian kinerja LPD yang diukur dengan *Balanced Scorecard*. Hal lain dilakukan oleh Riana (2010) melakukan mapping budaya *tri hita karena* dengan budaya Schein seperti hubungan dengan Tuhan dianalogikan dengan *basic assumption*, hubungan dengan manusia dianalogikan dengan *value system* dan hubungan dengan alam dianalogikan dengan *artifact*.

Pengaruh Institusi (desa Adat) terhadap LPD

Brinkerhoff (1992) mencoba menjelaskan peranan institusi dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro (seperti: hukum, peraturan formal, adat istiadat, konvensi, norma sosial dan kode etik) yang dimiliki sebagai suatu kekuatan pendorong pertumbuhan perusahaan. Lingkungan institusi merupakan seperangkat aturan dasar hukum sosial dan politik fundamental yang menjadi pijakan untuk produksi, perdagangan, dan distribusi (Davis dan North, 1971). Oleh karena itu, institusi mempunyai peran penting karena dapat menciptakan suatu struktur dalam kehidupan sehari-hari dengan mendefinisikan dan membatasi seperangkat pilihan yang dimiliki oleh individu dan organisasi.

Lembaga perkreditan desa dimiliki oleh lembaga desa adat, Lembaga desa adat dilandasi oleh budaya harmoni dalam kegiatan seharian. Kepemilikan LPD yang dilandasi nilai-nilai harmoni yang bersumber pada ajaran agama akan memengaruhi persepsi tentang realitas termasuk realitas ekonomi dan keuangan. Dengan kata lain pemilik memaknai apa yang dipunyai bukan usaha mereka melainkan atas karunia Tuhan sehingga hasil yang dicapai akan dipersembahkan kembali kepada-Nya sebagai perwujudan terima kasih. Artinya, di dalam kepemilikan LPD ada unsur spiritual yang dikemas dalam praktik nilai-nilai harmoni. Hal ini dibuktikan dengan hasil empiris kemampuan nilai-nilai harmoni memengaruhi kredit bermasalah. Hasil kajian ini mendapat dukungan dari pemikiran Laversen dan Peng (2007) yang mengatakan bahwa spiritualitas akan menentukan preferensi/masyarakat berkeyakinan, berpikir, dan berperilaku. Spiritualitas akan memengaruhi bagaimana individu/masyarakat mengambil tindakan dan keputusan. Di samping itu, memiliki peran penting dalam mengkonfigurasi mekanisme persepsi yang membuat individu/masyarakat melakukan interpretasi, baik atas diri sendiri maupun orang lain. Kepemilikan oleh lembaga *desa adat* atas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mampu meningkatkan kinerja keuangan melalui penurunan biaya-biaya yang terkait dengan biaya keagenan dengan cara pengawasan dan penerapan *awig-awig desa adat* oleh *bendesa adat* dengan baik.

Kepemilikan oleh lembaga desa adat yang semakin dominan atas LPD membuka ruang untuk menerapkan pengawasan di tingkat banjar melalui penerapan *awig-awig desa adat* yang semakin ketat terhadap proses pelayanan kredit kepada *krama desa adat*. Hal itu mampu menumbuhkan ketaatan nasabah membayar kredit sehingga permasalahan kredit dapat diturunkan (Astawa et al (2013). Kepemilikan yang dibalut dengan adat istiadat, religi , budaya, dan *awig-*

awig menumbuhkan loyalitas pengelola untuk menjalankan secara tulus ikhlas atas aturan yang digariskan oleh pemilik terkait dengan pelayanan kredit ke masyarakat dengan penuh kehati-hatian. Hal tersebut dapat mengurangi konflik keagenan sehingga biaya keagenan menjadi berkurang dan akhirnya LPD semakin efisien.

Peranan LPD Terhadap Masyarakat

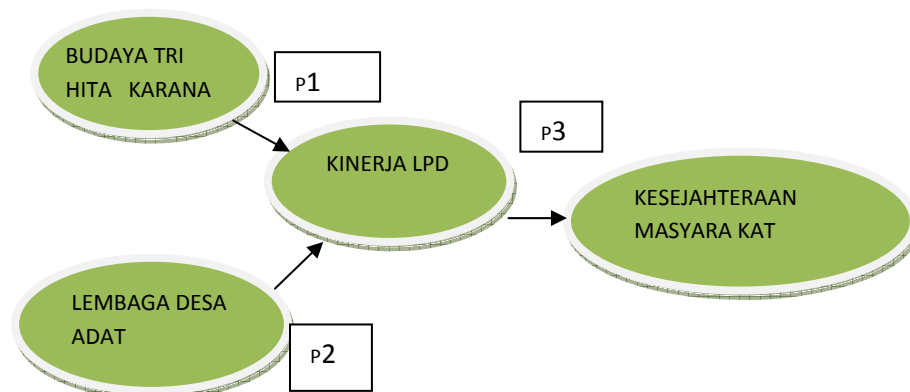
Berbagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperbaiki perekonomian rakyat di pedesaan. Upaya-upaya tersebut tidak hanya ditempuh oleh pemerintah, tetapi juga oleh organisasi non pemerintah. Salah satu upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam perekonomian adalah dengan merancang berbagai jenis kredit dan tabungan pedesaan seperti Kupedes, Simpedes, dan Koperasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga keuangan mikro. Lembaga ini dibentuk untuk membantu masyarakat (seperti: petani, pegawai, dan buruh) untuk melepaskan diri dari praktek keuangan yang tidak menguntungkan yang biasanya dilakukan oleh rentenir, Ijon, lintah darat, dan lembaga sejenisnya (Gunawan, 2010).

Lembaga keuangan mikro mempunyai tujuan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga diharapkan mempunyai kemampuan finansial untuk mencapai kemandirian. Menurut Khandker (1988) efisiensi biaya harus menjadi perhatian utama untuk mencapai kemandirian pada lembaga keuangan mikro. Yaron, *et al.*, (1977) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja secara teoritis bukan hanya dari kemandirian saja, tetapi luasnya jangkauan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan Arsyad (2008) mengemukakan bahwa kinerja dan keberlangsungan lembaga keuangan mikro yang baik tergantung pada faktor internal (mekanisme kredit dan manajemen) dan faktor eksternal (ekonomi sosial, lingkungan peraturan, informasi pasar tidak sempurna).

Kinerja lembaga keuangan mikro diperlukan dalam memecahkan berbagai masalah yang ada di tingkat pedesaan yang berbeda dengan bank-bank komersial. Kondisi ini telah dilakukan kajian secara intensif oleh Ghate (1988) tentang hubungan kinerja lembaga keuangan mikro dengan bank-bank komersial dengan hasil bahwa lembaga keuangan mikro dan bank-bank komersial dapat saling menggantikan satu dengan yang lain. Bank komersial lebih mampu memenuhi kebutuhan pinjaman dalam jumlah besar dan jangka waktu lama sehingga cocok untuk melayani industri skala besar dan menengah sedangkan lembaga keuangan mikro memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah guna mengurangi kemiskinan.

Pengembangan Konsep

Berdasarkan kajian sebelumnya dapat dikembangkan sebuah konsep hubungan antar variabel adalah sebagai berikut



Gambar 1: Pengembangan konsep

Dari hubungan antar variabel dapat dibangun hipotesis :

1. Penerapan budaya harmoni dengan baik akan meningkatkan kinerja LPD
2. Pengawasan oleh Lembaga Desa Adat akan meningkatkan kinerja LPD
3. Kinerja LPD akan memberikan pelayanan kredit dengan baik dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

1. Kewirausahaan sosial dalam bentuk lembaga LPD yang memperhatikan faktor lingkungan terutama mengenai budaya lokal akan memperkuat keberadaan usaha yang dapat meningkatkan kinerja.
2. Penerapan nilai-nilai harmoni THK dengan baik di LPD mendorong para nasabah untuk melakukan pembayaran kredit dengan baik karena di dalam praktik nilai harmoni ada unsur yang berkaitan dengan Tuhan yang diyakini memberikan fibrasi positif tentang keberhasilan yang dilakukan di dunia ini.
3. Nilai-nilai Falsafah Tri Hita Karana membentuk sikap mental serta perilaku pengelola
4. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang telah memainkan peran dalam pertumbuhan
5. Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Kewirausahaan sosial yang memperhatikan faktor lingkungan terutama mengenai budaya lokal akan memperkuat keberadaan usaha yang lebih sustain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincolin, 2008. *Lembaga Keuangan Mikro; Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Astawa Putu I, Made Sudarma, Siti Aisjah Djumahir, 2012, Credit Risk and Harmonious Values Practice (Study at Village Credit Institution (Lembaga Perkreditan Desa) Of Bali Province), *Journal of Business and Management, Volume 6, Issue 4, PP 16-20*
- Astawa Putu I, 2013 ,Ownership in the Perspective of Ethnomethodology at the Village Credit Institutional in Bali, *Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 4, No.8, pp 55-62*
- Astawa Putu I, Made Sudarma, Siti Aisjah Djumahir, 2013, Institutional Ownership and Harmonious Values in Increasing Financial Performance of Village Credit Institution (Lembaga Perkreditan Rakyat/ LPD) in Bali Province, *Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 3, No. 6, pp 813-824*.
- Baliaga, 2000. Bentuk Desa di Bali. <http://www.baliaga.com>.
- Barensen dan Gartner 2004. "Repayment rate of loans from semi-formal financial institutions among small-scale farmers in Ethiopia: two-limit tobit analysis", *Journal of Socio-Economics, Vol. 37 No. 6, pp. 2221-2230*.
- Brinkerhoff, 1992. Promoting the Sustainability of Development Institutions : A Framework for Strategy. *World Development, 20 (3), 369-383*.
- Davis dan North, 1971 .Microlending in emerging economies: building a new line of inquiry from the ground up", *Journal of International Business Studies, Vol. 42, pp. 1-22*.
- Dharmayuda, I.M.S., 2001. Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali. Denpasar: Upada Sastra.

- El Ebrashi, R. (2010), "Toward a behavioral theory of social entrepreneurship", PhD dissertation, German University in Cairo, Egypt.
- Ghate Prabu. 1988 Informal Credit Market in Asian Developing Countries. *Asian Development Review*, 6(1):64-68
- Gunawan Ketut, 2010. Analisis Faktor Kinerja Organisasi LPD di Bali (Suatu Pendekatan Perpektif *Balanced Scorecard*), *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol 11, No. 2 , pp 172-182.
- Gorda . IGN, 2003. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Penerbit Sekolah Tinggi Satya Dharma Singaraja.
- Johnson, S. (2000), "Literature review on social entrepreneurship", available at: www.bus.ualberta.ca/ccse/Publications/Publications/Lit_Review_SE_November_2000.rtf (accessed February 20, 2011).
- Jiao Hao. (2011) A conceptual model for social entrepreneurship directed toward social impact on society, *Social Enterprise Journal* Vol. 7 No. 2, 2011 pp. 130-149
- Kontan, 2010. Lembaga Kredit Desa Beraset Raksasa, *Kontan* 29 Desember 2010 Halaman 11
- Khandker, Shaidur R. 1988. Micro-credit Programme Evaluation: A Critical Review. *Institute of Development Studies Bulletin*, 29(4):1-20
- Laversen dan Peng (2007). The effect of social capital on group loan repayment: evidence from field experiments", *The Economic Journal*, Vol. 117, February, pp. F85-F106.
- Mair, J. and Noboa, E. (2006), "Social entrepreneurship: how intentions to create a social venture are formed?", in Mair, J., Robinson, J. and Hockerts, K. (Eds), *Social Entrepreneurship*, Macmillan, New York, NY.
- Mort et al. 2003 "Determinants of repayment in microcredit: evidence from programs in the United States", *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 26 No. 2, pp. 360-376.
- Nicholls, A. (2006), *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, Oxford University Press, New York, NY.
- Nicholls, A. (Ed.) (2008), *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, Oxford University Press, Oxford
- Pemerintah Tingkat I Bali, 2002. *Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa Bali*
- Peraturan Daerah No. 16., 2002. *Rencana Strategik Pembangunan Provinsi Bali*. Bali
- Riana, I. G., 2010. The Impact of Tri Hita Karana Culture Implementation on Entrepreneurship Orientation and Market Orientation and Its Consequences on Business Performance Moderating by Business Learning, *Dissertation*, Economic Faculty, Universitas Brawijaya.
- Robinson, J.A., Mair, J. and Hockerts, K., (Eds) (2009), *International Perspectives of Social Entrepreneurship*, Palgrave, London.
- Schein, Edgar, H., 2004. *Organizational Culture and Leadership*, John Wiley and Sont.
- Sobirin Ahmad, 2007. Budaya Organisasi: Pengertian, Makna dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi, Penerbit: UPP STIM YKPN Jakarta
- Suartana, I Wayan, 2009. *Arsitektur Pengelolaan Risiko Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*, Edisi Pertama , Udayana University Press, Denpasar.
- Windia, W., dan Ratna K. Dewi. 2007. *Analisis Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana*, Penerbit Universitas, Udayana, Denpasar.

Yaron, Yacob, McDonald Benjamin & Gerda Piprek. 1977 Rural Finance: Issue, Design, and the Best Practice, *Environmentally and Socially Sustainable Development Studies and Monographs Series 14*. Washington D.C.: The World Bank.

Zahra, S.A., Rawhouser, H.N., Bhawe, N., Neubaum, D.O. and Hayton, J.C. (2008), "Globalization of social entrepreneurship opportunities", *Strategic Entrepreneurship Journal*, Vol. 2 No. 2, pp. 117-31